BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Pelaksanakan penerapan SOP (standar operasional Prosedur) di Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Taruna/i mampu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan kerja, khususnya dalam proses pelayanan dan pengujian kendaraan bermotor. SOP yang diterapkan di instansi tersebut merujuk pada regulasi resmi seperti PM 133 tahun 2015 dan PM 19 Tahun 2021 serta sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Melalui kegiatan magang ini, Taruna/i tidak hanya memahami prosedur secara teori, tetapi juga mengaplikasikan langsung di lapangan dalam setiap proses kerja. Hal ini membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan standar pelayanan publik.
2. Pelaksanaan proses pengujian serta penetapan hasil pengujian kendaraan bermotor
Taruna/i memperoleh kesempatan dalam mengamati serta turut berpartisipasi dalam berbagai tahapan pengujian kendaraan bermotor. Kegiatan ini mencakup penggunaan alat-alat pengujian emisi gas buang hingga pada pemeriksaan kolong kendaraan. Taruna/i belajar melakukan proses pengambilan data, pencatatan hasil, serta memahami bagaimana hasil pengujian ditetapkan secara akurat dan objektif sesuai dengan standar pengujian yang berlaku. Hal ini memperkuat keterampilan teknis serta memperluas wawasan praktis dalam bidang pengujian kendaraan.
3. Menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada di Unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor
Taruna/i dihadapkan pada kondisi nyata di mana kemampuan berpikir kritis dan analitis sangat dibutuhkan. Taruna/i dilatih untuk mengenali akar permasalahan seperti ketidaksesuaian data kendaraan, kesalahan sistem input, atau kendala teknis pada alat uji. Dari pengalaman tersebut, taruna/i belajar merumuskan solusi, berkoordinasi dengan pihak terkait dan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah secara efektif.

4. Adaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja yang nyata

Taruna/i mampu beradaptasi dengan ritme kerja, budaya organisasi, serta tata tertib instansi. Interaksi dengan pegawai, teknisi, dan pada Masyarakat pengguna layanan juga memberikan pembelajaran sosial yang berarti. Taruna/i dituntut untuk bersikap profesional, menjunjung etika, serta menjalin kerja sama yang baik dengan semua pihak. Kemampuan adaptasi ini menunjukkan kesiapan taruna/i dalam menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan Pendidikan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan selama magang kedua, kami merekomendasikan untuk meningkatkan layanan dan kinerja Unit Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

- a. Perlu adanya penambahan jalur pengujian mengingat tingginya jumlah kendaraan wajib uji (KBWU) yang datang setiap hari, disarankan kepada UPPKB Kabupaten bogor untuk mempertimbangkan penambahan jalur pengujian. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penyalangan; mengurangi waktu tunggu, serta meningkatkan efisiensi kinerja penguji.
- b. Perlu adanya pemeliharaan berkala dan terstruktur sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kalibrasi alat hendaknya dilaksanakan secara rutin agar hasil pengujian tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Perlu adanya kesadaran penguji akan kesehatan dan keselamatan kerja dengan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang sudah ada. Sebagai contohnya adalah penerapan penggunaan masker, helm keselamatan, sarung tangan dan lainnya.

2. Teknis pelaksanaan

Perlu adanya pemanfaatan dan pengembangan teknologi digital. Sistem REM KIR sudah berjalan dengan baik dan terintegrasi, namun dalam pelaksanaan teknis pengujian di lapangan, pencatatan hasil uji

terkadang masih dilakukan secara manual sebelum diinput pada sistem. Disarankan agar seluruh tahapan proses pengujian termasuk pengambilan data lapangan dapat dilakukan secara langsung melalui sistem digital yang terhubung dengan pusat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi.

3. Administrasi

- a. Peningkatan efektivitas sistem pendaftaran online yang telah diterapkan diharapkan dapat terus dikembangkan agar lebih responsive, mudah diakses, dan memberikan kepastian waktu pelayanan.
- b. Disarankan agar proses dokumentasi dan arsip hasil uji kendaraan bermotor dilakukan secara digital dan terintegritas. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pencarian data, efisiensi ruang penyimpanan, serta meningkatkan akurasi dan keamanan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perhubungan. (2020). KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. In Pemerintah Republik Indonesia.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- Kementerian Perhubungan. (2019). KP.1954/AJ.502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bemotor
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun. (1999). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999